

# MENATA PRODUKSI PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU PASCA PEMEKARAN KEPULAUAN RIAU

*Aras Mulyadi\**

**Abstract:** Legalisation of Riau Archipelago Province have influenced the marine and fisheries production of Riau Province. That this why, Riau Province must be important to arrange marine and fisheries sector to increase its production. Aquacultur production can be developed by 1) aquacultur system based on ecosystem, 2) aquacultur system based on comodities, and 3) aquacultur system based on product oriented. Fishing production can be developed by 1) optimalization system of fishing armadas, and 2) relocation of fishermen on the potential fishing ground.

*Key Words: Riau Province, fisheries, marine, production*

## Pendahuluan

Provinsi Riau terletak pada pantai timur pulau Sumatera; berbatasan langsung dengan Negara tetangga seperti Singapura, dan Malaysia. Semula, Provinsi Riau memiliki wilayah seluas lebih kurang 329.867 Km<sup>2</sup>, yang dibentuk oleh daratan seluas 94.561,60 Km<sup>2</sup> (28,67 %) dan lautan atau perairan lebih kurang 235.366 Km<sup>2</sup> (71,33 %). Selain itu, Riau juga memiliki luas wilayah ZEE lebih kurang 379.000 Km<sup>2</sup>, jumlah pulau besar dan kecil 3.214 buah, dengan wilayah pantai sepanjang 1.800 mil. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau maka terjadi penyusutan luas wilayah Provinsi Riau. Luas wilayah Provinsi Riau saat ini lebih kurang seluas 101.823,60 Km<sup>2</sup>: daratan lebih kurang 83.965,60 Km<sup>2</sup> (setara 82,46 %), dan laut atau perairan seluas 17.858,00 Km<sup>2</sup> (setara 17,54 %), jumlah pulau 1.917 buah, dan mempunyai 4 (empat) buah

sungai besar dengan Daerah Aliran Sungai seluas 8.060.625 Ha.

Provinsi Riau tergolong daerah kaya terutama sumberdaya minyak dan mineral serta sumberdaya alam hayati lainnya. Sungguhpun demikian, kondisi sosial ekonomi masyarakat Riau masih tertinggal dibandingkan daerah lainnya. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau (2004) mengidentifikasi angka masyarakat miskin daerah Riau sebesar 22,19 %, sebagian besar masyarakat (lebih kurang 54,76 %) baru tamat dan tidak tamat Sekolah Dasar (SD), dan realitas infrastruktur sebagai penopang pembangunan masih jauh di bawah angka kebutuhan idealnya. Memperhatikan kondisi di atas maka Pemerintah Provinsi Riau memfokuskan arah kebijakan pembangunannya pada: 1) pengentasan kemiskinan melalui pembangunan ekonomi masyarakat, 2) pengentasan kebodohan melalui pembangunan akses dan fasilitas pendidikan, serta 3) pemenuhan sarana dan fasilitas pendukung melalui pembangunan infrastruktur; lebih populer dengan sebutan K2I (Kemiskinan, Kebodohan, Infrastruktur).

\*) Dosen Pascasarjana Ilmu  
Lingkungan Universitas Riau

Bidang perikanan memainkan peran dominan dalam pengentasan kemiskinan. Daerah Riau memiliki potensi wilayah dan komoditas beragam dalam bidang ini. Potensi perikanan dan kelautan Provinsi Riau pun telah lama dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi; dan masih memberikan harapan yang baik bagi sumber kehidupan masyarakat.

### Keragaan Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau

#### a. Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Secara garis besar, potensi ini terdistribusi di perairan Laut Cina Selatan, Selat Malaka, perairan umum (seperti sungai, danau, rawa-rawa dan waduk), wilayah pesisir dan pantai. Potensi ini telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan jasa ekosistem (Tabel 1).

tangkap di Laut Cina Selatan masih terbuka lebar, hanya saja membutuhkan teknologi yang lebih tinggi dan penggunaan kapal-kapal berukuran besar.

Potensi perikanan budidaya di Provinsi Riau hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi perikanan budidaya dimaksud meliputi: a) Potensi budidaya perairan tawar (kolam) sebesar 14.000 ha, baru dimanfaatkan 9,45 % atau 1.345 ha pada tahun 2001 dan 1.527 ha (10,73 %) pada tahun 2002 serta 1.738 ha (12,41%) tahun 2003. b) Potensi budidaya keramba di perairan umum sebesar 16.400 ha, baru dimanfaatkan sebesar 0,09 % pada tahun 2001 dan 0,77 % pada tahun 2002 serta 0,42 % (68,96 ha) pada tahun 2003. c) Potensi budidaya tambak sebesar 16.400 ha, baru dimanfaatkan sebesar 2,55 % pada tahun 2001 dan 8,07 % pada tahun 2002 serta 11,2 % (2.240 ha) pada tahun 2003. d) Potensi budidaya laut dan pantai,

Tabel 1.  
Potensi dan tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan Riau tahun 2003.

No	URAIAN	Sumberdaya tersedia	Potensi Lestari	Tingkat Pemanfaatan	(%)
1.	Laut Cina Selatan (ton)	602.384	361.430	216.960,3	60,03
2.	Selat Malaka (ton)	141.546	84.928	96.513,1	113,64
3.	Perairan Umum (ton)	23.720	14.232	14.569,9	102,37
4.	Kolam (ha)	16.000	14.000	1.731,2	12,37
5.	Tambak (ha)	32.000	20.000	2.255,5	11,28
6.	Keramba P.Umum (ha)	20.500	16.400	70,8	0,43
7.	Keramba Laut (ha)	235.000	211.500	648,6	0,31

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, 2004

Potensi perikanan tangkap Provinsi Riau tersebut memiliki potensi sumberdaya ikan yang masih menjanjikan dan belum sepenuhnya termanfaatkan. Di mana potensi lestari sebesar 361.430 ton pada tahun 2003, baru tereksploitasi sebesar 60,03 persen. Peluang usaha perikanan

terdistribusi di Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Dumai, Pelalawan dan Siak; pemanfaatannya masih sangat terbatas.

#### b. Produksi Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau

Produksi perikanan dan kelautan di Provinsi Riau pada tahun 2004 tercatat sebesar 361.520,60 ton. Terjadi sedikit peningkatan produksi jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Kecenderungan peningkatan produksi terjadi pada perikanan budidaya, sebaliknya produksi perikanan tangkap cenderung menurun (Tabel 2).

#### a. Paradigma Pengembangan Perikanan Budidaya.

Memperhatikan potensi saat ini maka paradigma pembangunan perikanan dan kelautan Provinsi Riau dalam memacu produksi mesti mengutamakan: "pengembangan perikanan budidaya, ketimbang pengembangan perikanan tangkap". Paradigma ini sejalan dengan

Tabel 2.  
Produksi Perikanan dan kelautan Provinsi Riau 2002-2004

No	Jenis Usaha	Produksi Tahun (Ton)		
		2002	2003	2004
1	Perikanan Tangkap Laut	308.595,10	313.473,40	308.303,50
2	Perikanan Tangkap P.Umum	14.285,60	14.569,80	14.713,90
3	Perikanan Budidaya	26.491,60	32.515,90	38.503,20
	Jumlah	349.372,3	360.559,10	361.520,60

Sumber: Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi Riau

Total produksi perikanan dan kelautan pada Tabel 2 merupakan angka statistik produksi perikanan Provinsi Riau yang masih digabung dengan Provinsi Kepulauan Riau. Pemakaran wilayah Provinsi Kepulauan Riau secara langsung berpengaruh kepada produksi perikanan Provinsi Riau. Olahan data statistik produksi perikanan tahun 2004 memperlihatkan bahwa pemekaran wilayah administratif Provinsi Kepulauan Riau memberi konsekuensi pengurangan total produksi perikanan Provinsi Riau sebesar lebih kurang 52,68 % dari total produksi. Penyusutan produksi terbesar terjadi pada produksi perikanan tangkap, yakni lebih kurang sebesar 54,88 %. Sebaliknya produksi perikanan budidaya hanya terjadi penyusutan sebesar 30,45% dari total produksi.

#### Paradigma Pengembangan Produksi Perikanan

semboyan "Optimalkan budidaya dan kendalikan penangkapan ikan". Maksudnya, Provinsi Riau mesti mengupayakan secara optimal usaha perikanan budidaya dan mengendalikan usaha perikanan tangkap atas dasar pertimbangan kondisi pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap yang telah melebihi potensi lestari. Pengembangan perikanan budidaya masih terbuka secara luas karena pemanfaatannya hingga saat ini masih kurang dari 20 %. Pemanfaatannya pun sebagian besar masih bersifat tradisional, di mana Rumah Tangga Perikanan (RTP) perikanan budidaya masih mengusahakan lahan dalam skala kecil: 48,08 % mengusahakan lahan < 0,1 Ha; 36,52 % mengusahakan lahan 1 - 0,3 Ha; dan 8,11 % mengusahakan lahan 0,3 - 0,5 Ha (Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, 2005). Kondisi ini mengakibatkan rendahnya produktivitas pembudidayaan

ikan. Selain itu, rendahnya produktivitas juga dipicu oleh rendahnya ketrampilan (*skill*), lemahnya modal, dan permasalahan budaya (Wawancara Aras Mulyadi, Riau Tribune, 2006). Sejalan dengan itu, rendahnya produktivitas perikanan budidaya menurut Dahuri (2003) antara lain disebabkan oleh: 1) masih rendahnya kemampuan teknologi budidaya (mencakup pemilihan induk, pemijahan, penetasan, pembuahan, pemeliharaan larva, pendederan, pembesaran, manajemen kualitas air, manajemen pemberian pakan, genetika, manajemen kesehatan ikan, dan teknik perkolaman); 2) kompetisi penggunaan ruang (lahan perairan) antara usaha budidaya perikanan dengan kegiatan pembangunan pada umumnya merugikan usaha budidaya perikanan; 3) semakin buruknya kualitas sumber air untuk budidaya perikanan, khususnya di kawasan padat penduduk atau tinggi intensitas pembangunannya, sehubungan dengan berkembangnya kegiatan industri, pertanian, dan rumah tangga yang tidak ramah lingkungan atau membuang limbah ke alam tanpa memperhatikan ambang batas limbah; 4) struktur dan mekanisme diseminasi teknologi yang lemah; 5) lemahnya kemampuan pasca panen, baik teknologi pengolahan maupun kemampuan pemasaran produk perikanan.

Untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya di Provinsi Riau, beberapa upaya yang dapat ditempuh, antara lain:

*Pertama*, pola pengembangan berbasis ekosistem: 1) pengembangan teknologi budidaya perikanan berbasis ekosistem laut melalui budidaya laut di daerah Kabupaten Rokan Hilir,

Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hilir; 2) pengembangan teknologi budidaya perikanan berbasis ekosistem pesisir melalui budidaya tambak di Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hilir; 3) pengembangan teknologi budidaya perikanan berbasis ekosistem perairan umum melalui budidaya kolam dan keramba di Kabupaten Kampar, Kabupaten Singingi, Kabupaten Rokan Hulu, Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak.

*Kedua*, pola pengembangan perikanan budidaya berbasis komoditas: 1) pengembangan budidaya perikanan berbasis komoditas ikan ekonomis unggulan (*mina unggul*), 2) pengembangan budidaya perikanan berbasis komoditas ikan hias (*mina hias*). Komoditas unggulan yang dapat dikembangkan pada kegiatan budidaya perikanan menurut Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2005) meliputi: krustase (udang-udangan), ikan bersirip (*fin fish*), rumput laut, moluska (kerang-kerangan), echinodermata, ikan hias, labi-labi dan kodok lembu. Budidaya udang windu (*tiger prawn*), udang vanamae (*banana prawn*), dan ikan nila (*nile tilapia*) telah berkembang baik di Provinsi Riau. Sementara budidaya rumput laut, moluska, ikan hias, labi-labi dan kodok baru pada tahap awal (jika tidak dikatakan belum dimulai). Provinsi Riau juga memiliki potensi sumberdaya perikanan lokal yang beragam dan pantas untuk diangkat menjadi komoditas unggulan daerah, antara lain dari kelompok:

krustase (udang galah, kepiting, udang kipas), ikan bersirip (kakap, kurau, ikan mas, ikan lele, gurame, patin siam, patin jambal, ikan baung, ikan kelemak, ikan selais), moluska (kerang dara, kerang hijau, tiram mutiara), ikan hias (botia, pantau segi tiga, arowana, tilan), dan labi-labi. Udang galah, kepiting, udang kipas merupakan kelompok udang-udangan yang dikenal sebagai "luxury food" (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2005). Sentra pengembangan udang galah (*freshwater shrimp*) dapat dikembangkan di Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu; kepiting (*mud crab*) amat potensial dikembangkan di Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan, Kota Dumai; udang kipas (*Metapenaeus shrimp*) potensial dikembangkan di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Rokan Hilir. Ikan bersirip sebagian teknologinya telah dikuasai dengan baik di Provinsi Riau. Budidaya ikan kakap (*barramundi*) telah dikembangkan di Kabupaten Bengkalis. Potensi pembudidayaannya masih belum tergali di Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kota Dumai. Pengembangan budidaya ikan patin siam (*siam cat fish*), ikan baung (*baung cat fish*), ikan kelemak (*grass carp*), dan ikan selais juga telah berkembang dan masih besar peluang pengembangannya di Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak. Jenis ikan patin jambal (*jambal cat fish*) merupakan satu komoditas perikanan budidaya yang

sedang dikembangkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Patin jambal ini memiliki peluang ekspor yang besar karena memiliki kualitas daging yang baik dan mudah dibudidayakan dalam keramba jaring apung (sangkar terapung). Potensi pengembangannya amat menjanjikan pada 4 (empat) buah sungai besar dan danau serta waduk yang ada di Riau. Sentra pengembangan budidaya komoditas moluska amat potensial di Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Bengkalis. Ikan hias, khususnya jenis dari air tawar mempunyai potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Indragiri Hulu, Rokan Hulu dan Kabupaten Kauntan Singingi. Sedangkan jenis labi-labi, setakat ini sudah diusahakan di Kabupaten Indragiri Hilir. Sungguhpun demikian tidak tertutup kemungkinannya untuk dikembangkan di Kabupaten lain di Provinsi Riau.

Ketiga, pola pengembangan perikanan budidaya berbasis orientasi hasil: 1) pengembangan budidaya perikanan berorientasi pasar (*market oriented*), 2) pengembangan budidaya perikanan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat (*consumption oriented*), 3) pengembangan budidaya perikanan dengan orientasi untuk kelestarian lingkungan dan sumberdaya ikan (*sustainability oriented*). Pengembangannya dapat dilakukan melalui a) program intensifikasi budidaya yang berorientasi pada pasar ekspor dengan komoditas rumput laut, udang, kurau dan kakap; b) program budidaya pedesaan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan komoditas nila, dan jenis-jenis unggulan lokal; c) program perikanan budidaya

terintegrasi yang berorientasi pasar dan kebutuhan gizi masyarakat dengan komoditas nila dan komoditas unggulan lokal; d) program perbaikan lingkungan, pelestarian komoditas lokal langka dan melakukan restocking komoditas sumberdaya ikan (Ditjen Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2005). Dahuri (2003) mengemukakan bahwa percepatan pembangunan perikanan antara lain dapat melalui Gerakan Nasional Pembangunan Perikanan dan Kelautan (Gerbang Mina Bahari). Gerbang Mina Bahari dicanangkan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 11 Oktober 2003 di Teluk Tomini. Program ini bertujuan antara lain: 1) meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir, 2) meningkatkan penerimaan devisa negara dan kontribusinya terhadap PDB, 3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, 4) meningkatkan konsumsi ikan dan penyediaan bahan baku industri di dalam negeri, 5) memelihara kelestarian sumberdaya hayati perairan beserta ekosistemnya.

#### **b. Paradigma Pengembangan Perikanan Tangkap.**

Pemanfaatan potensi perikanan tangkap Provinsi Riau, baik di perairan umum maupun di perairan laut, telah memperlihatkan kondisi lebih tangkap (*over exploited*). Kemampuan tangkap armada perikanan yang beroperasi telah melebihi potensi tersedia. Berdasarkan itu, maka paradigma pembangunan perikanan tangkap yang sesuai adalah dengan cara *mengoptimalkan armada perikanan tangkap yang ada dalam melakukan eksploitasi sumberdaya perikanan, dan/*

atau dapat dikembangkan melalui *relokasi nelayan ke daerah tangkap (fishing ground)* yang lebih jauh dengan potensi yang masih baik, seperti di perairan Laut Cina Selatan dan Selat Karimata. Alternatif ini dapat ditempuh dengan jalan mempersiapkan kemampuan nelayan dan armadanya. Karena secara umum nelayan Provinsi Riau masih tergolong tradisional, di mana 39,16 % dari RTP nelayan masih menggunakan perahu tanpa motor dan motor tempel, dan 60,84 % dari RTP nelayan telah menggunakan kapal motor tetapi dengan kategori kecil (53,26 % RTP menggunakan kapal ukuran < 5 GT; 31,61 % kapal ukuran 5 – 10 GT; 5,74 % kapal ukuran 10 – 20 GT; 3,40 % kapal ukuran 20 – 30 GT; dan belum ada nelayan memiliki kapal > 30 GT, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, 2005). Pembinaan nelayan kecil perlu mendapat perhatian dalam pengembangan perikanan tangkap Provinsi Riau. Pengembangannya dilakukan melalui 1) program optimalisasi Kapal Perikanan Kecil melalui pemberdayaan nelayan tradisional, motorisasi alat tangkap ikan dan peralatan; 2) program optimalisasi pelelangan ikan melalui pembinaan dan pengembangan pelabuhan perikanan (PPI/TPI) di kawasan-kawasan potensial; 3) program optimalisasi pengolahan hasil tangkapan ikan di atas kapal dan pusat pendaratan ikan (Ditjen Perikanan Tangkap, 2004).

#### **Daftar Kepustakaan**

- Dahuri. R. 2003. Reorientasi Pembangunan Berbasis Kelautan. Ensiklopedi Tokoh Indonesia. Tokoh Indonesia.com, IndonesianFamous.com. 20 Januari 2003.

- Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2005. Membangun Kejayaan Perikanan Budidaya. [WWW.Indonesia.go.id](http://WWW.Indonesia.go.id). Artikel 9 Desember 2005.
- Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau. 2004. Master Plan Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau.
- Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau. 2004. Statistik Perikanan Provinsi Riau Tahun 2003.
- Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau. 2005. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2004.
- Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau. Pekanbaru.
- Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau. 2005. Statistik Perikanan Provinsi Riau Tahun 2004.
- Ditjen Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2005. Program strategis perikanan budidaya. Ditjen Perikanan Budidaya, DKPRI. Jakarta.
- Ditjen Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2004. Akuakultur Masa Depan Perikanan Indonesia: Kinerja Pengembangan Akuakultur 2000 - 2003. Ditjen Perikanan Budidaya, DKPRI, Jakarta.
- Ditjen Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2004. Program strategis perikanan tangkap. Ditjen Perikanan Tangkap, DKPRI. Jakarta.
- Menteri Kelautan dan Perikanan republik Indonesia. 2005. Sambutan Pembukaan Rapat Koordinasi Pembangunan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta.
- Riau Tribune. 2006. Wawancara Eksklusif dengan Dr. Aras Mulyadi, DEA, Wakil Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau.